

PENGARUH FAKTOR PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR IURAN JKN DI MASA PANDEMI COVID-19

Sri Sularsih Endartiwi

STIKes Surya Global Yogyakarta

Korespondensi: tiwinafla2@gmail.com

ABSTRAK

Peserta BPJS Kesehatan dari kelompok mandiri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai pengetahuan yang cukup baik terkait dengan informasi-informasi terbaru terkait dengan kenaikan biaya iuran untuk peserta BPJS Kesehatan. Peserta masih belum sepenuhnya menerima adanya kenaikan iuran kepesertaan untuk kelompok PBPB dikarenakan pada saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut membuat kurang lebih 20% harus menunggak membayar iuran setiap bulannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan rancangan *cross sectional*. Populasi pada penelitian adalah peserta mandiri JKN di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sampel diambil secara *quota sampling* dengan jumlah sebanyak 30 peserta di Kota Yogyakarta dan 30 peserta di Kabupaten Bantul. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah 60 peserta. Data kuantitatif dianalisis menggunakan Chi Square. Hasil penelitian ini adalah tidak ada pengaruh faktor pengetahuan terhadap kemauan membayar iuran JKN di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19, dengan nilai p-value 0,690. Serta ada pengaruh faktor sikap terhadap kemauan membayar iuran JKN di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19, dengan nilai p-value 0,045. Kesimpulan: tidak ada pengaruh faktor pengetahuan terhadap kemauan membayar iuran JKN. Serta ada pengaruh faktor sikap terhadap kemauan membayar iuran JKN di Yogyakarta.

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Kemauan

ABSTRACT

National Health Insurance participants from the independent participants in the City of Yogyakarta and Bantul Regency already have fairly good knowledge regarding the latest information related to the increase in the cost of contributions for NHI participants. Participants still have not fully accepted the increase in membership fees for the independent participants group due to the current Covid-19 pandemic which has an impact on the economic condition of the community. This condition makes approximately 20% have to pay monthly dues arrears. This type of research is a survey research using quantitative descriptive method with a cross sectional research design. The population in this study were independent participants of the National Health Insurance in Yogyakarta City and Bantul Regency. Samples were taken by quota sampling with a total of 30 participants in Yogyakarta City and 30 participants in Bantul Regency. So the number of samples in this study was 60 participants. Quantitative data were analyzed using Chi Square. The results of this study are that there is no influence of the knowledge factor on the willingness to pay the National Health Insurance contributions in Yogyakarta during the covid-19 pandemic, with a p-value of 0.690. There is also the influence of attitude factors on willingness to pay National Health Insurance contributions in Yogyakarta during the covid-19 pandemic, with a p-value of 0.045. Conclusion: there is no influence of knowledge factor on willingness to pay National Health Insurance contributions in Yogyakarta. There is also the influence of attitude factors on willingness to pay National Health Insurance contributions in Yogyakarta.

Keywords: Knowledge, Attitude, Willingness to pay

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dalam bidang kesehatan serta mempunyai kewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, serta turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Dengan demikian, masyarakat sebagai sasaran program merupakan salah satu komponen yang harus dipersiapkan untuk ikut serta dalam pembiayaan jaminan kesehatan sesuai kemampuannya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Besaran premi/iuran bagi Peserta PBP dan Peserta PBI yaitu sebesar: Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I (Perpres RI No 82, 2018).

Thabrany (2005), mengemukakan bahwa pendanaan kesehatan yang adil dan merata adalah pendanaan dimana seseorang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan membayar pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya. Meskipun sudah diperkenalkan tarif yang dihitung atas dasar *Ability to Pay* dan *Willingness to Pay*, permasalahan tarif yang terjangkau masih belum selesai karena sifat kebutuhan yang tidak pasti.

Ketidak mampuan secara ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan membayar atas pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hal ini menyebabkan ketidak sesuaian antara apa yang mampu dibayarkan dengan apa yang diharapkan. Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan keseimbangan antara kebutuhan medis dan kemampuan ekonominya. Sudah menjadi kewajiban negara untuk mensubsidi pembayaran bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu sehingga pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan tidak dilakukan secara dipaksakan, namun pelayanan yang tetap didasari asas keadilan dalam menerima pelayanan kesehatan. Artinya tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan sesuai dengan harapan keseluruhan masyarakat (Handayani, 2013).

Masa pandemi yang mulai terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini dengan jumlah kasus yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini menimbulkan berbagai macam dampak, mulai dari sisi kesehatan masyarakat sampai pendapatan perekonomian yang menurun dikarenakan aktifitas yang di batasi dan pekerjaan di gantikan dengan *Work From Home* (WFH) sehingga keadaan ini mempengaruhi kemampuan (*Ability To Pay*) dan kemauan (*Willingness To Pay*) pada masyarakat peserta mandiri untuk membayar iuran kesehatan.

Berdasarkan hasil survey di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap peserta mandiri terkait dengan kemampuan untuk membayar iuran selama pandemi covid-19 terungkap pendapatan keluarga yang menurun berbanding lurus

dengan kemampuan dan kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Masyarakat merasa keberatan dengan jumlah iuran yang harus mereka bayarkan setiap bulannya. Misalnya saja pendapatan keluarga sebulan sebesar Rp.2.000.000 dengan anggota keluarga sebanyak 4 orang dengan pemilihan kelas III, iuran yang harus dibayarkan sekitar Rp.100.000. Biaya untuk makan setiap bulan berkisar Rp.1.200.000 atau Rp.40.000 per hari, pembayaran listrik kurang lebih Rp.500.000 dan lain-lain Rp.200.000, perhitungan tersebut sebagai salah satu gambaran kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini (Endartiwi, 2020).

Peserta BPJS mandiri kurang lebih 89% mengeluh tidak mampu lagi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan meskipun itu hanya kelas III. Akan tetapi karena merasa membutuhkan BPJS kesehatan maka mau tidak mau tetap membayar iurannya dengan konsekuensi harus mengorbankan kebutuhan yang lainnya. Selain itu akhirnya ada peserta yang menunda atau menunggak membayar iuran BPJS nya. Hanya sekitar 11% peserta BPJS mandiri yang tidak mengalami kesulitan tetap membayar iurannya (Endartiwi, 2020).

Peserta mandiri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mayoritas mau untuk tetap membayarnya. Akan tetapi, kondisi ekonomi yang tidak stabil selama pandemi covid-19 ini membuat mereka berfikir kembali untuk selalu tepat waktu dalam membayar iuran. Masyarakat juga sadar akan pentingnya BPJS Kesehatan terutama waktu mengalami sakit (Endartiwi, 2020).

Sekitar 95 persen penduduk Kota Yogyakarta terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS Kota Yogyakarta per 30 September 2017 sebanyak 381.611 jiwa dari total jumlah penduduk 410.262 jiwa (BPJS Kesehatan, 2017).

Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa peserta BPJS Kesehatan dari kelompok PBPU sudah mempunyai pengetahuan yang cukup baik terkait dengan informasi-informasi terbaru terkait dengan kenaikan biaya iuran untuk peserta BPJS Kesehatan. Peserta masih belum sepenuhnya menerima adanya kenaikan iuran kepesertaan untuk kelompok PBPU dikarenakan pada saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut membuat kurang lebih 20% harus menunggak membayar iuran setiap bulannya. Kondisi tersebut membuat kurang lebih 20% harus menunggak membayar iuran setiap bulannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor pengetahuan dan sikap terhadap kemauan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masa pandemi Covid-19 tahun 2021.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain atau rancangan penelitian *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada tahun 2021. Besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Quota Sampling* yaitu menentukan sampel populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (quota) yang diinginkan. Teknik ini dipilih karena keterbatasan data terkait peserta BPJS Mandiri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Maka jumlah sampel yang di butuhkan dari penelitian ini adalah 60 sampel dari peserta BPJS mandiri di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021.

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pengetahuan dan Sikap. Variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah kemauan untuk membayar. Penelitian ini menggunakan alat ukur kuesioner untuk mengetahui pengetahuan, sikap maupun kemauan membayar iuran pada responden penelitian. Analisis data menggunakan uji chi square untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas ke terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 60 responden yang terbagi untuk Kota Yogyakarta sebanyak 30 responden dan Kabupaten Bantul 30 responden.

a. Karakteristik Responden Penelitian

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 1 berikut ini menyajikan data tentang karakteristik responden penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur di Yogyakarta Tahun 2021

Umur	Frekuensi	Persentase
20 – 40 tahun	21	35,0
41 – 60 tahun	29	48,3
>60 tahun	10	16,7
Jumlah	60	100
Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	52	86,7
Perempuan	8	13,3
Jumlah	60	100
Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Ibu Rumah Tangga	3	5,0
Buruh	15	25,0
Tukang Parkir	3	5,0
Sopir	2	3,3
Pedagang	5	8,3
Wiraswasta	22	36,7
Karyawan swasta	10	16,7
Jumlah	60	100
Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	8	13,3
SMP	4	6,7
SMA	32	53,3
S1	16	26,7
Jumlah	60	100
Jenis Keperawatan	Frekuensi	Persentase
Mandiri	60	100
Jumlah	60	100
Kelas Perawatan	Frekuensi	Persentase
Kelas 1	2	3,3
Kelas 2	13	21,7
Kelas 3	45	75
Jumlah	60	100
Fasilitas Tingkat Pertama	Frekuensi	Persentase

Puskesmas	51	86,7
Klinik Pratama	7	11,7
Dokter Praktek Swasta	1	1,6
Jumlah	60	100
Lama Kepesertaan	Frekuensi	Persentase
1 – 4 tahun	37	61,7
5 – 8 tahun	22	36,7
>8 tahun	1	1,6
Jumlah	60	100
Tunggakan Pembayaran Iuran	Frekuensi	Persentase
Pernah Menunggak	2	3,3
Tidak Pernah menunggak	58	96,7
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Terolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa responden pada penelitian ini terbanyak adalah berumur antara 41 – 60 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau 48,3%. Umur responden yang paling sedikit adalah di atas 60 tahun yaitu sebanyak 10 responden atau 16,7%.

Tabel 1 tersebut menyajikan data tentang karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis kelamin. Responden pada penelitian ini paling banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 86,7% atau 52 orang. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang atau 13,3%.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pekerjaan responden penelitian ini paling banyak adalah bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebanyak 22 orang atau 36,7%. Jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah sebagai sopir yaitu berjumlah 2 orang atau 8,3%.

Pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah SMA sebanyak 32 orang atau 53,3%, dan yang paling sedikit adalah SMP sebanyak 4 orang atau 6,7%.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa 100% responden adalah merupakan peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kelas perawatan yang paling banyak dipilih oleh responden pada penelitian ini adalah kelas 3 yaitu sebanyak 45 orang atau 75%. Kelas 1 adalah kelas yang paling sedikit dipilih oleh responden penelitian ini, yaitu sebanyak 2 orang atau 3,3% saja.

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang paling banyak dipilih oleh responden pada penelitian ini adalah puskesmas yaitu sebanyak 51 orang atau 86,7%. Dokter praktek swasta adalah merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang paling sedikit dipilih oleh responden yaitu 1 orang saja atau 1,6%.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa lama kepesertaan menjadi peserta JKN paling banyak adalah selama 1-4 tahun yaitu sebesar 61,7% atau sebanyak 37 orang. Responden yang menjadi peserta sudah di atas 8 tahun hanya berjumlah 1 orang saja.

Berdasarkan data pada tabel 1 diketahui bahwa sebanyak 2 orang responden (3,3%) pernah menunggak dalam membayar iuran. Responden yang tidak pernah menunggak pembayaran iuran JKN adalah 58 orang atau 96,7%.

b. Uji Univariat

1. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan

Tabel 10 berikut ini menyajikan data distribusi responden penelitian berdasarkan pengetahuan responden tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan di Yogyakarta Tahun 2021

Pengetahuan Responden	Frekuensi	Persentase
Tidak Baik	27	45,0
Baik	33	55,0
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Terolah, 2022

Responden penelitian yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebanyak 33 orang atau 55%, sedangkan responden yang pengetahuannya kurang baik adalah 27 orang atau 45%.

2. Distribusi Responden Berdasarkan Sikap

Tabel 3 berikut ini menyajikan data tentang distribusi responden berdasarkan sikap responden tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Sikap di Yogyakarta Tahun 2021

Sikap Responden	Frekuensi	Persentase
Tidak Baik	21	35,0
Baik	39	65,0
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Terolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa sikap responden yang baik sebanyak 39 orang atau 65%, sedangkan sikap yang tidak baik sebanyak 21 orang atau 35%.

3. Distribusi Responden Berdasarkan Kemauan Membayar

Distribusi responden penelitian berdasarkan kemauan membayar iuran JKN disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Kemauan Membayar di Yogyakarta Tahun 2021

Kemauan Membayar	Frekuensi	Persentase
Tidak Mau Membayar	7	11,7
Mau Membayar	53	88,3
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Terolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa responden yang mau membayar iuran JKN adalah berjumlah 53 orang atau 88,3%, sedangkan responden yang tidak mau membayar adalah sebanyak 7 orang atau 11,7%.

c. Uji Bivariat

1. Pengaruh antara Pengetahuan dan Kemauan Membayar Iuran

Tabel 5 berikut ini merupakan data *Crosstabulation* Pengaruh antara pengetahuan dan kemauan membayar iuran pada peserta mandiri JKN.

Tabel 5. Crosstabulation Pengaruh antara Pengetahuan dan Kemauan Membayar Iuran Pada Peserta Mandiri JKN di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021

Pengetahuan	Kemauan Membayar				n	%	p-value	OR
	Tidak Mau Membayar		Mau Membayar					
	n	%	n	%				
Tidak Baik	4	6,7	23	38,3	27	45,0	0,690	1,739
Baik	3	5,0	30	50,0	33	55,0		
Jumlah	7	11,7	53	88,3	60	100		

Sumber: Data Primer Terolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai p-value adalah 0,690 yang berarti p-value > α 0,05. Jadi, H_0 diterima dan H_a ditolak, yaitu tidak ada pengaruh antara pengetahuan dengan kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta.

2. Pengaruh antara Sikap dan Kemauan Membayar Iuran

Tabel 6 berikut ini menyajikan data *crosstabulation* pengaruh antara sikap dan kemauan membayar iuran pada peserta mandiri JKN di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19.

Tabel 6. Crosstabulation Pengaruh antara Sikap dan Kemauan Membayar Iuran Pada Peserta Mandiri JKN di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021

Sikap	Kemauan Membayar				n	%	p-value	OR
	Tidak Mau Membayar		Mau Membayar					
	n	%	n	%				
Tidak Baik	5	8,4	16	26,6	21	35,0	0,045	5,781
Baik	2	3,3	37	61,7	39	65,0		
Jumlah	7	11,7	53	88,3	60	100		

Sumber: Data Primer Terolah, 2022

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai p-value pengaruh antara sikap dan kemauan membayar iuran pada peserta mandiri JKN di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19 adalah 0,045 atau < α 0,05. Jadi, H_0 ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh yang signifikan antara sikap dan kemauan membayar iuran pada peserta mandiri JKN di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19. OR bernilai 5,781 yang berarti responden yang mempunyai sikap kurang baik akan berisiko sebesar 5,781 kali lebih besar untuk tidak mau membayar iuran JKN.

B. Pembahasan

Penelitian tentang pengaruh faktor pengetahuan dan sikap terhadap kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan jumlah sampel adalah 60 responden peserta mandiri JKN.

1. Pengaruh faktor pengetahuan terhadap kemauan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masa pandemi Covid-19 tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor pengetahuan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kemauan untuk membayar iuran JKN di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19. Pengetahuan peserta JKN yang baik sebesar 55% sedangkan peserta yang pengetahuannya tidak baik sebesar 45%.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden sebagian besar mempunyai pengetahuan yang baik program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sumber informasi tentang program ini diperoleh responden dari BPJS Kesehatan, petugas puskesmas maupun rumah sakit, media

massa maupun dari sosial media. Responden juga sudah mengetahui adanya kenaikan biaya iuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2020.

Mulai bulan April, Mei dan Juni 2020 iuran peserta program JKN-KIS mengikuti Perpres 82 tahun 2018 yaitu :

- 1) Sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan untuk kelas I.
- 2) Rp. 51.000,00 (lima puluh satu rupiah) untuk kelas per orang dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan untuk kelas II.
- 3) Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan untuk kelas III.

Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebesar Rp 42.000, untuk tahun 2020 pemerintah memberikan subsidi Rp 16.500 sehingga peserta akan membayar iuran sebesar Rp 25.500/bulannya, dan untuk Januari 2021 pemerintah memberikan subsidi Rp 7.000 sehingga peserta akan membayar iuran sebesar Rp 35.000/bulannya, peserta di ruang perawatan Kelas II membayar iuran sebesar Rp 100.000, dan Peserta di ruang perawatan Kelas I membayar iuran sebesar Rp150.000 (PP No 64 Tahun 2020).

Pengetahuan terhadap pelayanan kesehatan akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap biaya pelayanan kesehatan, dimana persepsi ini juga dipengaruhi dari pengalaman, proses belajar, wawasan dan pemikirannya. Hal ini termasuk juga dalam tindakan seseorang untuk membayar biaya kesehatannya, dalam penelitian ini adalah kemauan untuk membayar iuran program JKN sebagai peserta mandiri.

2. Pengaruh faktor sikap terhadap kemauan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masa pandemi Covid-19 tahun 2021

Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor sikap terhadap kemauan untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta selama masa pandemi covid-19. Sikap peserta program JKN pada penelitian ini sebagian besar merasa tidak setuju dengan kenaikan iuran program JKN ini. Responden menyatakan dengan kenaikan iuran ini akan semakin memberatkan peserta apalagi selama masa pandemi covid-19 pendapatan menurun bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang besar di segala aspek kehidupan. Namun demikian, dampak yang cukup dirasakan adalah dampak dalam bidang ekonomi (Aeni, 2021). Selain itu, peserta mandiri JKN juga menganggap belum tentu pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik dengan dinaikkannya iuran program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut.

Peserta mandiri JKN juga menyatakan bahwa akan berusaha untuk tidak menunggak dalam membayar iuran JKN. Hal ini dikarenakan peserta sudah mengetahui jika menunggak maka akan kena denda dan bisa jadi malah menjadi beban untuk mereka. Selain itu, peserta tidak akan menunggak membayar iuran karena peserta sering menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat. Jika berobat dengan BPJS Kesehatan maka biayanya akan gratis sedangkan jika menjadi pasien umum maka biaya berobatnya bisa mahal atau habis biaya banyak.

Sikap adalah reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap ini tidak dapat dilihat langsung, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Komponen sikap sendiri terdiri atas kepercayaan, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek dan kecenderungan untuk bertindak (Kusuma, 2021).

Utilisasi pelayanan kesehatan sejak isu kenaikan iuran JKN oleh pemerintah masih perlu dikaji lebih mendalam walaupun masyarakat cenderung menolak kenaikan tersebut. Utilisasi pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan iuran JKN, akan tetapi pola sebaran penyakit atau masalah kesehatan dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan (Hasibuan dkk, 2020).

Respon keberatan oleh peserta JKN bila ditinjau dari psikologis merupakan kondisi dari hukum Law of Effect, yang diartikan bila respons peserta JKN terhadap kenaikan iuran menghasilkan efek positif, maka hubungan besaran iuran dan ketaatan membayar akan berbanding lurus, dan ketaatan membayar akan sejalan dengan utilitas pelayanan kesehatan. Demikian pula sebaliknya. Walau demikian dapat diyakini, jawaban responden merupakan bentuk sikap *covert behavior*, yaitu keberatan naiknya iuran masih dalam bentuk terselubung dalam diri dan sebagian besar belum diikuti tindakan nyata untuk tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas secara intens. Dalam konteks jaminan kesehatan nasional (JKN), kalkulasi biaya itu dilihat dari besaran iuran per bulannya (Hasibuan dkk, 2020).

SIMPULAN

Tidak ada pengaruh faktor pengetahuan terhadap kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19 tahun 2021. Ada pengaruh faktor sikap terhadap kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta pada masa pandemi covid-19 tahun 2021.

UCAPAN TERIMAKASIH

STIKes Surya Global Yogyakarta atas dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. 2021. Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17(1), 17-34.
- BPJS Kesehatan, 2017. Jumlah peserta JKN-KIS Kota Yogyakarta. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2017/583/95-Persen-Penduduk-Yogyakarta-Terdaftar-Dalam-Program-JKN-KIS>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.
- BPJS Kesehatan. 2020. *Data Peserta BPJS Mandiri Kabupaten Bantul*. BPJS. Yogyakarta
- Endartiwi, Sri Sularsih. 2020. *Nasib Peserta Mandiri BPJS Kesehatan*. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta. Tanggal 2 Oktober 2020
- Fauziyyah, I. 2016. Analisis ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay) terhadap Keputusan Penentuan Kelas Iuran Jaminan Kesehatan Pada Sopir Angkot di Kota Semarang. *Universitas Negeri Semarang*.
- Handayani, Elmammy. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Masyarakat Membayar Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Laporan Penelitian. Universitas Padjajaran *Jurnal of Economics*, 9(3), 131-143.
- Hasibuan dkk. 2020, Respon Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Dan Utilitas Puskesmas Oleh Peserta JKN Di Medan, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKEI*. 9(4), 211-277. <https://doi.org/10.22146/jkki.59237>.
- Kartono, K. 2005. *Teori Kepribadian*. Mandar Maju : Bandung
- Kartono, K. 2005. *Teori Kepribadian*. Mandar Maju : Bandung

ARTIKEL PENELITIAN

Jurnal Kesehatan, Vol. 11 No. 2 (2022). ISSN 2086-9266 e-ISSN 2654-587X

DOI 10.37048/kesehatan.v11i2.405

- Kusuma, A. 2021. *Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran Pasien PBPJ Jaminan Kesehatan Nasional di RS Sufina Medan* (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan) diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/>
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2018. *Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Russel, Sreven. 1996. *Ability To Pay For Health Care: Concepts and Evidence*
- Soemanto, W. 2012. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Statika Untuk Penelitian*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Thabrany, Hasbullah. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang- undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2004
- Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009